TUHAN, Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku

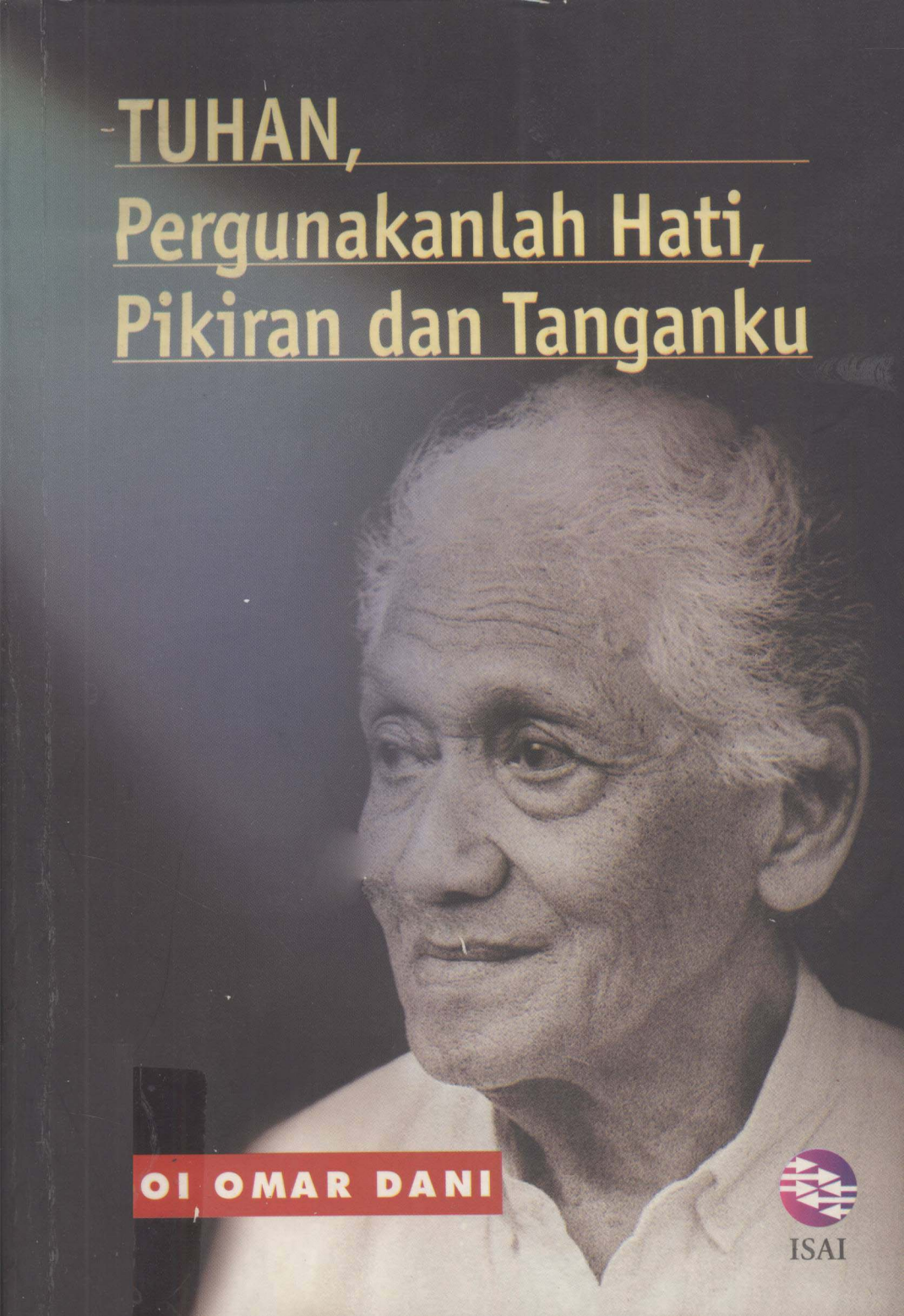

OI OMAR DANI

ISAI

TUHAN, Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku: Pledoi Omar Dani

Benedicta A. Surodjo
JMV. Soeparno

Diterbitkan oleh **PT Media Lintas Inti Nusantara**

PT MEDIA LINTAS INTI NUSANTARA

untuk **Institut Studi Arus Informasi**

Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran, dan Tanganku: Pledoi Omar Dani
© Omar Dani
ISBN 979-8933-32-X
Pengarah
Wisnu Djajengminardo
A. Andoko
Penulis
Benedicta A. Surodjo
JMV. Soeparno
Kulit Buku **FX. Harsono**
Tata Letak **Hendra**
Diterbitkan **PT Media Lintas Inti Nusantara**
untuk **Institut Studi Arus Informasi**
Jl. Utan Kayu 68 H-Jakarta
Cetakan Pertama, Januari 2001
Percetakan PT Sembrani Aksara Nusantara

Pengutipan tanpa izin tidak dibenarkan, kecuali untuk kepentingan keilmuan dan resensi. Memperbanyak buku ini dalam bentuk reproduksi apa pun tidak diperkenankan. Hak cipta dilindungi undang-undang. All Rights Reserved

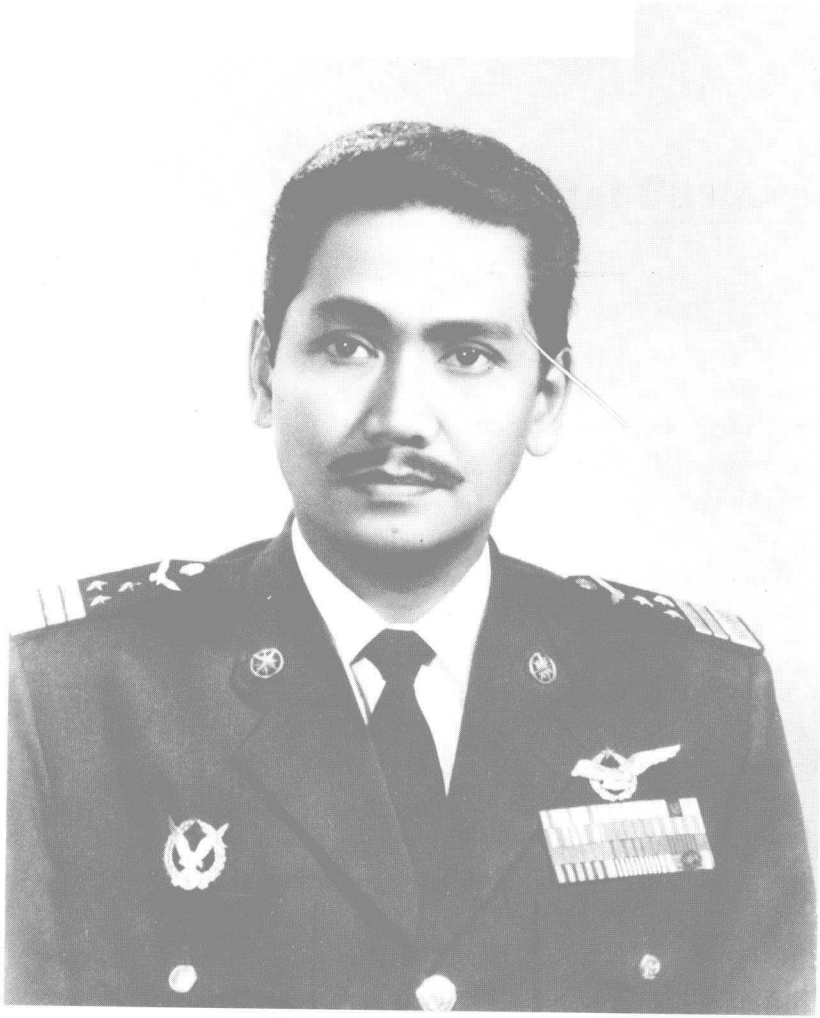

Omar Dani selaku Men/Pangau dengan pangkat Laksamana Madya Udara.

TUHAN,
Pergunakanlah Hati,
Pikiran dan Tanganku:
Pledoi Omar Dani

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

"De herinnering des menschen aan geleden onrecht is lang;
gedaan onrecht wordt spoedig vergeten".
Ingatan orang akan penderitaan akibat kelaliman akan lama hilangnya;
kelaliman yang seseorang lakukan, akan lekas dilupakan olehnya.

Ir H. Sukarno dalam *Indonesia Menggugat*

PENGANTAR PENERBIT

Karya-karya yang lahir dari balik tembok penjara, baik fiksi maupun non-fiksi, sebagian besar telah menjadi karya yang termahsyur. Dari khasanah dalam negeri misalnya, kita mengenal karya-karya Pramoedya Ananta Toer, yang ditulisnya saat "bermukim" di Pulau Buru. Atau Sutan Sjahrir dengan karyanya "Renungan Indonesia", sebuah catatan politik Bung Sjahrir, saat mendekam di penjara di masa penjajahan Hindia Belanda, ditulis dalam bahasa yang indah. Itu dimungkinkan, karena karya itu lahir dari permenungan mendalam penulisnya. Bila kita sedikit berempati pada mereka, terutama bagi narapidana politik, berada di balik tembok penjara, adalah keperihan tak terpermanai.

Buku yang kini ada di hadapan pembaca, juga adalah produk dari balik terali besi, tentang Pledoi Omar Dani. Perjalanan hidup Omar Dani, memberikan pelajaran pada kita, bahwa hidup manusia adalah berliku dan menikung, yang kadang terlalu tajam. Perjalanan karirnya semasa aktif di AURI (kini TNI-AU), demikian melesat. Namun secepat itu pula karirnya kandas, saat terjadi perubahan politik besar di negeri ini. Omar Dani adalah salah satu figur yang tergulung pada masa itu. Sesudahnya, sebagaimana kita tahu, ia meringkuk dalam penjara rezim Orde Baru, selama hampir 30 tahun. Memasung kebebasan seseorang selama 30 tahun, apalagi untuk

kasus politik, dipandang dari sudut manapun, adalah kesia-siaan belaka. Benar kiranya, asumsi yang kini dipegang pemerintahan Gus Dur, bahwa orang tak perlu ditahan hanya karena berbeda pendapat dengan penguasa. Ini sesuai dengan makna demokrasi, yang salah satu wujudnya adalah menghargai perbedaan pendapat.

Ihwal keterlibatan Omar Dani dalam peristiwa "G30S" sebagaimana stigma yang ia tanggung selama ini, merupakan perdebatan yang belum selesai hingga kini. Ini juga berlaku bagi figur-figur yang lain. Bahkan, induk dari semua peristiwa itu, yaitu apa itu sebenarnya Peristiwa G30S, tak kunjung terang jua, entah sampai kapan. Pada setiap waktu dan kesempatan, masih akan muncul perdebatan yang panjang soal tema-tema semacam ini.

Buku ini juga masih merupakan diskusi. Karena penulisan sejarah selalu berkembang, yang senantiasa bisa direvisi, bila didapatkan fakta baru. Pledoi Omar Dani penting untuk disimak, karena di sana bisa ditemukan beberapa fakta baru. Terlebih bila dihubungkan dengan peristiwa G30S, sebuah momentum sejarah yang masih tersimpan rapi dalam memori kolektif bangsa kita.

Jakarta, 29 Januari 2001

KETIKA REZIM POLITIK BERGANTI

Oleh **Asvi Warman Adam**

Suatu ketika pada masa Orde Baru seorang guru sejarah membawa murid-muridnya ke museum Angkatan Udara di Yogyakarta. Di situ terpampang foto-foto pimpinan Angkatan Udara dari dulu sampai sekarang. Ada foto KSAU pertama, tetapi langsung kepada KSAU ketiga dan seterusnya. Kisah ini dituturkan oleh Prof. Dr. Ayatrohaedi dalam sebuah seminar. Menurut dosen FSUI itu, cara menghitung Orde Baru memang ajaib: dari satu langsung tiga. Foto yang tidak dipasang itu adalah foto Omar Dani.

Demikianlah salah satu cara rezim Orde Baru merekayasa sejarah.

UNTUK APA REKAYASA SEJARAH ?

Menurut Michael Sturner "Di negeri yang tanpa sejarah, masa depan dikuasai oleh mereka yang menguasai isi ingatan, yang merumuskan konsep dan menafsirkan masa lalu."[1] Dan mereka itu

[1] François Bedarida, "Historical Practice and Responsibility" dalam

adalah tak lain daripada orang-orang yang ingin meneguhkan kekuasaan. Para pemegang kekuasaan dalam rangka mempertanggungjawabkan legitimasi dan manifestasi kekuasaan mereka tentu akan melakukan "penguasaan ingatan kolektif". Tidaklah aneh bila di mana-mana, penguasaan terhadap gambaran masa lampau dijadikan sebagai pembenaran sistem yang dipakai sekarang.

Seorang pemimpin dari negeri yang dulu dijuluki sebagai tirai besi, Khrouchtchev mengakui bahwa sejarawan adalah "satu kelompok yang bisa mempertanyakan legitimasi penguasa"[2] . Dengan dokumen primer yang dimilikinya sejarawan dapat mengungkap dan merekontruksi peristiwa sosial-politik yang terjadi jauh pada masa lampau tanpa bisa dibantah oleh pemerintah yang berkuasa. Masa lampau dipegang bukan untuk masa lalu itu sendiri tetapi demi penguasaan masa depan. "Penguasaan masa lampau untuk mengendalikan masa sekarang" bisa dibandingkan dengan perlombaan antariksa yang terjadi pada era perang dingin antara negara adidaya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka mendarat di bulan bukan untuk menguasai bulan, melainkan untuk mengontrol bumi.

PROSES PENGENDALIAN SEJARAH

Sedikitnya ada dua cara pengendalian sejarah. Pertama, dengan penambahan unsur tertentu dalam sejarah. Salah satu contoh berkaitan dengan genealogi; supaya sang pengusaha punya hubungan darah dengan Raja yang pernah jaya di masa lampau dibuatlah silsilah palsu tetapi harus dianggap asli (oleh rakyat).

Sejalan dengan ini, dibuatlah berbagai film[3] yang mengisahkan

---

Bedarida, François (ed) *The Social Responsibility of the Historian,* Providence/Oxford: Berghan Books, 1994, hal 4.

2 Marc Ferro, *L'histoire sous surveillance*, 1985, hal 30

3 Marc Ferro, *Cinéma et Histoire*, Denoël/Gonthier, 1977 dan Marc Ferro (ed), *Film et Histoire,* Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1984. Aspek ini disinggung dalam artikel Asvi Warman Adam, "Film sebagai Agen Sejarah", *Kompas,* 24 Mei 1998.

bahwa pemimpin yang sedang berkuasa adalah seorang pahlawan tanpa cacat, sedangkan orang yang menentangnya adalah musuh besar bangsa. Mungkin peran sang penguasa hanya secuil di dalam perjuangan tempo dulu, namun aspek kecil ini mesti dibesar-besarkan.

Cara kedua – ini lebih umum – adalah "kebisuan sejarah" (*le silence de l'histoire*). Menurut Marc Ferro, profesor pada *Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales* (EHESS), di Paris, paling sedikit ada tiga jenis kebisuan sejarah. **Pertama**, berkaitan dengan prinsip legitimasi. Kebisuan ini tampak sekali bila menyangkut sumber legitimasi (Dinasti, Partai, Gereja,dst). Kebisuan dalam sejarah Gereja misalnya dipecahkan ketika Laurent Valla dan Nicolas de Cues di awal abad XV mengungkap adanya dua dokumen utama tentang Paus yang ternyata palsu[4]. Untuk menjamin legitimasinya Raja tertentu di Perancis tempo dulu tidak menginginkan sejarawan menulis bahwa dia bukan keturunan pahlawan perang Troya. Sejarawan pun terpaksa atau dipaksa membisu. Dalam kasus Jepang, dikatakan tidak ada kekerasan dan perampasan kekuasan sejak kekaisaran Jepang diciptakan Dewa-Dewa. Di Jepang ada buku sejarah yang menyebut tahun 660 SM (Sebelum Masehi) sebagai tahun penciptaan negeri Sakura itu oleh Dewi Amaterasu. Ketika bukti arkeologis menunjukkan bahwa itu tidak benar, kalangan nasionalis ekstrem bereaksi keras. Mereka mempertanyakan keabsahan bukti itu [5]

Contoh tadi menunjukkan bahwa demi kepentingan tertentu, sejarah bisa direkayasa. Tahun 1968, terbit buku sejarah karya Ienaga Saburo. Pemerintah Jepang tidak melarang buku ini, tetapi minta supaya dilakukan 216 modifikasi atau penghilangan serta 38 penambahan, antara lain karena di situ tidak diberikan "justifikasi"

---

4 Marc Ferro, 1985, hal. 61

5 Pierre-François Souyri, *Le Moyen Age Japonais, Histoire et Ecriture de l'histoire* ,1984. dan Marc Ferro, *Comment on raconte l'histoire aux enfants à travers le monde entier*, Payot, 1986

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II sejak tahun 1941[6].

Kebisuan dalam sejarah partai juga dibeberkan oleh Ferro: Lenin sesungguhnya melakukan semacam "kudeta kecil" dengan membuang proklamasi penyerahan kekuasaan dari pemerintahan sementara ke Komite Revolusioner Sementara tahun 1917. Ada satu kalimat yang dicoret Lenin. Jika kalimat itu dipertahankan Lenin bisa jadi tidak memegang kekuasaan sendiri. Ini disembunyikan dalam sejarah yang yang disusun Partai Komunis Uni Soviet.

Kedua, berkaitan dengan kondisi masyarakat. Misalnya pandangan mengenai suku Arya sebagai "ras terpilih" yang unggul akan mempengaruhi penulisan sejarah. Di Jerman misalnya pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi tidak disinggung dalam buku sejarah yang terbit setelah 1945. Baru tahun 1960-an beberapa penulis roman dan sutradara film memecahkan kebisuan sejarah ini.

Contoh lain dalam sejarah yang ditulis di Eropa pada zaman kolonial, yang diungkapkan hanya suka-duka menaklukkan daerah jajahan. Ini terpantul dalam roman tulisan Tolstoy, Pierre Loti dan Kipling. Tidak disinggung penindasan terhadap penduduk pribumi atau pembunuhan terhadap pejuang setempat. Masyarakat kolonial memang menghendaki sejarah semacam itu.

Ketiga, menyangkut hal-hal yang memalukan di masa lampau. Masa lalu yang memalukan ditutup. Dalam daftar Raja Agni (di Ghana, Afrika) ada empat raja yang tidak dimasukkan di buku pelajaran sejarah. Raja yang "dicekal" untuk masuk buku pelajaran sekolah adalah raja yang dikalahkan penakluk Eropa atau yang bernasib malang atau sakit berkepanjangan. "Raja sejati tidak bisa dikalahkan atau ditangkap musuh", begitu prinsip mereka.

---

[6] Di Jepang pengajaran sejarah di SD dipadukan dengan pendidikan moral, geografi dan bahasa. Kempatnya disebut kokutai yaitu wawasan yang harus dimiliki setiap warga mengenai bangsa, jati diri dan masa lalunya. Pelajaran sejarah tidak hanya bertujuan menanamkan loyalitas dan pengorbanan pada negara, tapi juga mengangkat derajat pemimpin bangsa/Kaisar pada tingkat Dewa-Dewa.

Yang juga menjadi pertanyaan apakah hanya penguasa yang suka melakukan intervensi dalam penulisan dan pengajaran sejarah. Jawabannya tidak. Di berbagai negara memang ada keterlibatan penguasa (birokrasi, militer, partai bahkan gereja) dalam perekayasaan sejarah, namun di pihak lain masyarakat juga sering ikut campur. Di atas sudah dibicarakan tentang raja-raja yang sakit-sakitan tidak dimasukkan dalam sejarah, di sebuah negara Afrika, karena hal itu dianggap masyarakat sebagai sesuatu kelemahan dan memalukan. Di Jepang, masyarakat protes ketika diungkapkan penemuan arkeologi bahwa di Jepang sudah ada kehidupan sebelum 660 SM, karena di dalam buku sejarah diajarkan bahwa dalam tahun itu diciptakan kekaisaran Jepang oleh Jimmu. Di Indonesia, pengusulan pahlawan nasional oleh setiap daerah yang selalu bertambah dari waktu ke waktu, memperlihatkan intervensi masyarakat terhadap sejarah. Kecenderungan ini makin menguat sekarang. Setelah ada seorang pahlawan nasional sebagai "wakil" dari propinsi, kini kabupaten pun ingin mempunyai pahlawan juga. Alhasil, pertarungan sejarah itu terus berlangsung. Negara dan masyarakat sama-sama ingin dicatat di sana, walaupun seringkali peran penguasa yang sangat menonjol.

Pengendalian sejarah masa Orde Baru

Meskipun kontrol sejarah itu bisa juga berasal dari masyarakat, namun dalam kasus di berbagai negeri, tampaknya peran negara tetap lebih dominan. Untuk kasus Indonesia pada era Orde Baru, peran militer (dalam hal ini Angkatan Darat) sangat menonjol, mereka menjadi "dapur" yang mencetak sejarah resmi yang kemudian dijadikan bahan utama pengajaran sejarah di sekolah. Sejarah resmi merupakan sejarah institusi. Tentara (AD) sebagai institusi terkuat di negara ini di bawah Soeharto tentu menyadari pentingnya pengendalian sejarah.

Peristiwa Oktober 1965 memberi kesempatan bagi AD untuk tampil ke depan dengan tanpa saingan. Bila menjelang tahun 1965 dikenal ada tiga pilar politik utama di Indonesia: Soekarno, PKI dan

tentara, maka sesudah itu yang tinggal hanya tentara (yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto).

Seperti dikemukakan oleh Stanley mengenai Gerwani[7] , maka pers AD yang pertama mengungkapkan "kebiadaban aktivis PKI dan Gerwani yang di luar peri kemanusiaan". Pernyataan itu kini sangat diragukan kebenarannya. Rezim ini yang sangat getol membuat diorama pada berbagai monumen sejarah di tanah air yang pada umumnya menggambarkan kepahlawanan tentara dengan melecehkan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Lihatlah diorama pada Monumen di Lubang Buaya, apakah gambaran itu betul-betul akurat sesuai dengan kenyataan atau lebih banyak mengandung fitnah? Sementara itu cendekiawan muslim terkemuka, Nurcholish Madjid dalam suatu percakapan di LIPI pernah mengeluhkan diorama di Monas yang mengesankan orang Islam sebagai penyebab disintegrasi bangsa.

Pada masa awal Orde Baru strategi pengendalian sejarah mencakup dua hal: pertama, mereduksi peran Soekarno dan kedua, membesar-besarkan jasa Soeharto. Contoh yang pertama adalah muslihat yang mencoba menghilangkan gambar Soekarno dalam sebuah foto mengenai pengibaran bendera saat proklamasi kemerdekaan. Usaha lainnya berupa tindakan politik untuk melarang ajaran Soekarno. Termasuk dalam hal ini pelarangan pendirian Universitas Bung Karno oleh seorang putrinya.

Tindakan untuk membesarkan peran Soeharto dilakukan melakukan buku sejarah dan media lainnya seperti film. Salah satu contoh adalah serangan umum 1 Maret 1949 yang dibesar-besarkan bahkan dibuatkan monumen untuk mengenang peristiwa itu. Di dalam buku-buku pelajaran sejarah dikesankan bahwa konseptor serangan itu adalah Soeharto, padahal dua minggu sebelumnya Soeharto diminta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX ke kraton Jogya.

---

7 "Penggambaran Gerwani Sebagai Kumpulan Pembunuh dan Setan (Fitnah dan Fakta Penghancuran Organisasi Perempuan Terkemuka)", makalah dalam seminar yang diselenggarakan oleh MSI di Serpong 8 September 1999.

Jadi ide serangan itu sebetulnya dari Sri Sultan HB IX. Foto yang merekam pertemuan ini juga tidak dipasang pada monumen yang dibangun beberapa kilometer dari kota Jogyakarta. Jadi peran Sri Sultan sengaja dihilangkan.

Film *Janur Kuning* (1979) dan *Serangan Fajar* (1981) merupakan dua film yang dibuat semasa Orde Baru yang berkisah tentang pertempuran di Yogyakarta tahun 1949 – kemudian dikenal sebagai Serangan Umum (SU) 1 Maret- yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Penonjolan sosok Soeharto dalam Peristiwa SU 1 Maret merupakan bagian dari upaya membangun legitimasi historis rezim Orde Baru.

Film *Janur Kuning* yang biayanya Rp 385 juta (tahun 1979, hampir dua kali lipat biaya rata-rata pembuatan film Indonesia saat itu) menggambarkan Soeharto sebagai seorang komandan yang berwibawa, tenang, murah senyum. Daya fisiknya luar biasa. Setelah pertempuran panjang, anak buahnya tampak lelah, Soeharto tetap berjalan dengan energik. Seorang anggota pasukannya (di dalam film itu) berkata "Berjalan tujuh hari tujuh malam. Pak Harto tak pernah istirahat". Ia juga menjadi teladan bagi anak buahnya, ketika ditawari makanan oleh penduduk, ia memastikan dulu orang lain memperoleh makanan tersebut. Fokus kamera dan percakapan tertuju kepada Soeharto. Jenderal Sudirman dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX hanya disoroti sekilas. Dalam film ini divisualkan, Latief membawa berita bahwa Belanda menyerbu Yogya tanggal 19 Desember 1948. Pertanyaan Sudirman yang pertama-tama adalah "Bagaimana Soeharto ?"[8]

Penuturan George McTurnan Kahin[9] juga memperlihatkan hal

---

[8] Budi Irawanto, *Film, Ideologi & Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia,* Yogyakarta, Media Pressindo, 1999.

[9] George McTurnan Kahin, "Some Recollections from and Reflections on the Indonesian Revolution", in Taufik Abdullah (ed), *The Heartbeat of Indonesian Revolution*, Gramedia and Program of Southeast Asian Studies LIPI, 1997

serupa. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa gencarnya gerangan gerilyawan yang ditujukan ke hotel Merdeka yang dihuni pejabat Belanda pada tanggal 9 Januari 1949. Tetapi anehnya, peristiwa tersebut tak pernah disinggung dalam sejarah Indonesia. Ini termasuk bagian yang dilupakan dalam sejarah nasional.

Penguasaan ingatan kolektif dilakukan buku pelajaran, pembangunan monumen dan berbagai peringatan. Di Yogya untuk mengenang SU 1 Maret 1949 didirikan dua monumen yaitu Monumen "Serangan Umum 1 Maret" dan Monumen "Yogya Kembali".

Mengenai kasus G30S, sejak 1998, film tentang Gerakan Tiga Puluh September tidak lagi wajib disiarkan semua saluran televisi setiap tanggal 30 September malam. Kebijakan itu tampaknya untuk menghindari kontroversi yang timbul di tengah masyarakat tentang apa yang sebetulnya terjadi di balik kudeta tahun 1965. Namun keputusan itu sebetulnya belum menyelesaikan persoalan terutama dari segi penulisan dan pengajaran sejarah di Indonesia. Selama ini yang diajarkan di sekolah adalah versi resmi peristiwa tersebut yang dikeluarkan oleh aparat keamanan dan pemerintah.

Sejarah menurut E.H. Carr[10] adalah proses berkesinambungan dari interaksi antara sejarawan dan fakta-fakta yang dimilikinya, suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa sekarang dengan masa lampau. Jadi tidak ada tulisan atau buku sejarah yang final. Dalam kasus G30S pun sebetulnya tidak ada interpretasi akhir dan tunggal terhadap peristiwa tersebut.

PENULISAN (KEMBALI) SEJARAH AURI

Penerbitan buku ini dapat pula dilihat dalam konteks penulisan kembali sejarah AURI. Di dalam buku Wisnu Djajengwinardo, *Kesaksian: Memoir Seorang Kelana Angkasa* (1997) diungkapkan bahwa tahun 1995 Kasau Marsekal Rilo Pambudi pernah mengumpulkan perwira yang aktif tahun 1965/66 membicarakan usaha menjer-

[10] E.H.Carr, *What is History*, Penguin Books, 1987

nihkan sejarah yang menyangkut AURI dan Pangkalan Halim (hal 125). Tidak jelas kelanjutannya setelah itu. Namun yang terang pada hari Kamis 17 Desember 1998 di Wisma Darya, Jakarta Selatan diadakan pertemuan oleh PP AURI membicarakan rancangan penulisan buku. Dalam kesempatan itu saya hadir bersama Dr Onghokham. Hampir setahun kemudian terbitlah buku tersebut yang berjudul *Menyingkap Kabut Halim 1965*. Buku yang diluncurkan tanggal 9 November 1999 pada intinya membantah kesan selama 30 tahun ini bahwa "Halim itu sarang G30S/PKI". Bergaya "reportase sejarah", ditujukan kepada masyarakat luas dan bersifat ilmiah-populer, *Menyingkap Kabut Halim 1965* dalam waktu singkat telah mengalami cetak ulang sebanyak 5 (lima) kali.

Pada bulan Februari tahun 2000 terbit pula buku *Pedet Soedarman: Pengalaman Heroik Penerbang Bomber*. Dalam memoar ini dikisahkan pengalaman Soedarman dalam beberapa operasi militer di masa pergolakan di Indonesia terutama tahun 1955-an sampai 1965 dengan mengawaki pesawat bomber B-25 dan B-26. Baik buku Wisnu Djajengminardo maupun Pedet Soedarman menceritakan kecintaan mereka kepada profesi kedirgantaraan ini dan tampaknya kisah itu seakan berhenti pada tahun 1965. Dalam buku Pedet Soedarman, kentara terlihat keperkasaan AURI – baik secara individu maupun institusi – yang pernah disebut sebagai salah satu kekuatan terbesar angkatan udara di Asia Tenggara bahkan Asia. Namun seakan-akan kejayaan itu rontok setelah tahun 1965 bersamaan merosotnya kekuasaan Presiden Soekarno, pemimpin besar revolusi yang menjadi idola pimpinan AURI pada masa tersebut. Ketika itu terjadi pergantian rezim politik yang merupakan hasil pertarungan berbagai kekuatan yang berasal dari dalam dan luar negeri serta sekaligus merupakan konsekuensi dari Perang Dingin.

Setelah itu, pada bulan September 2000 terbit buku *Air Power (Kekuatan Udara)* yang disunting oleh Koesnadi Kardi dan Hendro Subroto. Dalam buku tersebut digarisbawahi pentingnya pengelolaan udara sebagai wilayah kedaulatan dan ruang angkasa. Berbagai permasalahan dan tantangan dalam mewujudkan kekuatan udara yang

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com